

# **PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK *PERSONAL GUARANTEE* YANG DINYATAKAN PAILIT**

**Luky Pangastuti**  
(Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS)  
**pangastutiluky@gmail.com**

## *Abstract*

*This research aim to know about the liability personal guarantee that declared bankrupt. The method used in this research is normative juridical by reviewing various laws that are formal. From these results it can be seen that the legal position guarantor loan or personal guarantee if the main debtor is declared bankrupt, the guarantor is obliged to provide accountability to creditors if the primary debtor can not fulfill its obligations in accordance with the contents of the security agreement that has been agreed by the creditor and the guarantor. The liability personal guarantee is a personal guarantee in the case of the bankruptcy debtor bind themselves bear the responsibility to fulfill the engagement when the principal debtor owes itself which does not comply. In this case the personal guarantee can be synonymous with the principal agreement so that the process of accountability that will be passed as well as the main debtor bankruptcy proceedings. Should all parties involved in the agreement of a guarantee in a personal guarantee to have enough knowledge about the importance of the guarantor (personal guarantee) in the case of bankruptcy, and vice versa debtor can give a full explanation to the lender about everything related to the guarantee agreement.*

**Key words:** *bankruptcy, debtor, personal guarantee*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban personal guarantee yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberian kredit kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitur utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditor apabila debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Adapun pertanggung jawaban *personal guarantee* yaitu *personal guarantee* dalam hal debitur pailit yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang manakala debitur utama sendiri yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini *personal guarantee* dapat diindetikkan dengan perjanjian pokok sehingga proses pertanggung jawabannya yang dilalui akan sama halnya dengan proses kepailitan debitur utama. Hendaknya semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian jaminan dalam *personal guarantee* memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya penjamin (*personal guarantee*) dalam perkara kepailitan, demikian sebaliknya debitur dapat memberikan penjelasan yang lengkap kepada kreditor tentang segala sesuatu yang menyangkut perjanjian jaminan.

**Kata kunci:** *pailit, debitur, personal guarantee*

## **A. Pendahuluan**

Suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya mengalami masalah sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Suatu perusahaan membutuhkan uang sebagai dana untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Namun tidaklah selamanya badan hukum memiliki uang yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhannya. Untuk

menutupi kekurangan uang tersebut, badan hukum seringkali meminjam uang yang dibutuhkan kepada pihak lain, seperti bank yang memberikan pinjaman dengan penyertaan adanya bunga. Di sini pihak yang memberikan pinjaman uang disebut kreditor atau si berpiutang, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur atau si berutang. Pemberian pinjaman atau kredit yang diberikan kreditor kepada debitur dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman tersebut

kepada kreditur tepat pada waktunya. Tanpa adanya kepercayaan dari kreditur, tidaklah mungkin kreditur mau memberikan pinjaman kepada debitur.

Pada saat perjanjian utang, pihak debitur juga sering menggunakan suatu jaminan untuk menjamin utang dari debitur itu sendiri. Di dalam jaminan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan “Segala kebendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Berdasarkan aturan ini dapat disimpulkan bahwa semua harta benda debitur dapat dijadikan jaminan utang, meskipun dalam perjanjian utang piutang tersebut tidak diikuti dengan perjanjian jaminan. Kemudian ada juga jaminan khusus, terdiri dari dua macam, yaitu: Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, 2010 : 73).

Pada jaminan perorangan yaitu pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang dimana orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dalam praktek pinjam meminjam seringkali ditemukan kreditur sebagai yang berpiutang selain meminta jaminan kebendaan kepada si berutang atau debitur juga meminta jaminan tambahan berupa jaminan non kebendaan atau immaterial, atau *personal guarantee* atau *borgtocht*.

Menurut Rahmita (2014 : 4) Keberadaan garansi/jaminan merupakan upaya guna memperkecil risiko. Garansi/jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Pemberian garansi/jaminan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemberian garansi/jaminan yang dilakukan oleh pribadi dan badan hukum. Adapun jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang jaminan perusahaan, perikatan tanggung-menanggung, dan garansi bank. Dalam penjaminan utang, pemberi jaminannya pihak ketiga secara perseorangan, sebaliknya pada jaminan perusahaan, pemberi jaminannya badan usaha yang berbadan hukum ( Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada regulasi

yang menjelaskan pengertian kepailitan dan utang. Oleh karenanya, para sarjana dan praktisi hukum bisnis, membuat definisi kepailitan dan utang yang digunakan sebagai acuan dalam praktek. Untuk menghindari perbedaan pemahaman tentang definisi kepailitan dan utang, yang digunakan sebagai acuan dan praktek, para penyusun UU tersebut telah memasukkan istilah-istilah kepailitan dan utang yang dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Sentosa Sembiring, 2006 : 11).

Menurut Syamsudin M. Sinaga (2012: 85) dalam bukunya Hukum Kepailitan Indonesia, maksud dan tujuan kepailitan, untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang atau adil kepada kreditur, debitur dan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Dalam perkembangannya sebuah perusahaan atau badan hukum memberikan garansi kepada kreditur berupa *corporate guarantee* dan ataupun *personal guarantee*. Jaminan immaterial terdiri dari *corporate guarantee* (jaminan perusahaan) atau *personal guarantee* (jaminan perorangan) sebagai penanggung untuk menjamin kepada kreditur dalam pelunasan utang debitur. Berkaitan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan adanya UU Kepailitan, seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* seringkali mengalami hal yang kurang menyenangkan sebagai akibat pihak kreditur meminta penetapan pengadilan untuk memailitkan *personal guarantee* atau *borgtocht*. Dalam KUHPerdata, penjamin atau penanggung diatur dalam Pasal 1831-1850.

Dari ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitur. Mengenai penanggungan dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dalam pengurusan dan pembebasan harta pailit pada kasus kepailitan, jaminan perorangan cukup berperan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur.

Pada beberapa kasus, kedudukan *personal guarantee* yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitor yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitor utama yang dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh kreditor secara langsung tanpa harus terlebih dahulu menyita harta dari debitor utama yang pailit. Kasus kepailitan dari penjamin ini dapat dilihat dalam perkara gugatan pailit antara PT. Bank NISP, Tbk sebagai pemohon pailit melawan Liem Iwan Yuwana yang bertindak sebagai penjamin yang dalam perkara ini posisinya sebagai termohon pailit, yang akan menjamin pelunasan utang PT. Metalindo Perwita apabila PT. Metalindo Perwita tidak dapat melunasi utangnya seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam kasus ini PT. Bank NISP, Tbk sebagai pemohon membuat Akta Jaminan (*borgtocht*) Perorangan dengan Liem Iwan Yuwana sebagai termohon, sebagaimana tercantum dalam Akta Jaminan (*borgtocht*) Perorangan Nomor 74, tertanggal 20 Juni 2006, dan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Jaminan (*borgtocht*) Perorangan Nomor 56 tertanggal 16 April 2007.

Tujuan akta *borgtocht* tersebut ditandatangani oleh Termohon pailit tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya pembayaran utang PT. Metalindo kepada Pemohon Pailit, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Metalindo dari Pemohon Pailit. Kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) tersebut maka termohon pailit menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk dan atas permintaan pertama dari pemohon pailit dan tanpa syarat apapun menggantikan kedudukan PT. Metalindo sebagai debitor dan/atau membayar dengan seketika dan sekaligus kepada pemohon pailit untuk semua utang dan/atau kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Metalindo kepada pemohon pailit, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian kredit. Berdasarkan uraian diatas selanjutnya akan dibahas mengenai pertanggungjawaban *personal guarantee* yang dinyatakan pailit.

## **B. Kedudukan Hukum *Personal Guarantee* Dalam Hal Debitor Dinyatakan Pailit**

KUH Perdata memberikan perumusan Jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu segala kebendaan seseorang baik

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Namun jaminan secara umum ini masih dirasakan kurang memadai oleh kreditor sehingga seringkali kreditor meminta diberikan jaminan khusus. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*).

Pada jaminan kebendaan, si debitor yang berhutang memberi jaminan benda kepada kreditor, sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitor. Debitor jika tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminan tersebut untuk melunasi hutangnya. Dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut (M. Yahya Harahap, 1982 : 315).

Penjamin sangat diperlukan dalam setiap kredit yang dilakukan oleh pihak debitor terhadap kreditor. Menurut Subekti, Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor. Perjanjian jaminan perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitor tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitor, atau antara kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor kebendaan (Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, 2010 : 73).

Penjamin (*Personal Guarantee*) dalam hukum kepailitan yaitu merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi (bukan badan hukum) untuk menjamin hutang orang/ badan hukum lain kepada seseorang atau beberapa kreditor.

Dalam KUHPerdata, jaminan perorangan (*personal guarantee*) diatur pada Bab XVII yaitu mengenai perjanjian penanggungan. Pada Pasal 1820 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan

si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Penjaminan atau penanggungan diatur di dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850 KUHPdata. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan status ekonomi garantor itu. Bonafilitas *garantor* secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya garantor itu diterima kreditor. Berkaitan dengan *garantor* pribadi ini, apabila perjanjian kredit jatuh tempo, dan debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, maka debitor dapat dimohonkan pailit.

Setelah debitor dinyatakan pailit, lalu semua hartanya dijual oleh kurator untuk membayar utang-utangnya. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka kurator dapat menjual harta garantor untuk menutupi kekurangannya. Jadi, garantor baru tampil memenuhi kewajibannya apabila debitor (utama) sudah kehabisan harta untuk membayar utang-utangnya (Sutan Remi Sjahdeini, 2010 : 97-98).

Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang *personal guarantor* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal guarantor* itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa garantor dapat dinyatakan pailit.

Banyak bank merasa bahwa *personal guarantee* hanya memberikan ikatan moral dari penjaminnya. Hal itu tidak benar. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam

harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.

Pada jaminan perorangan jika terjadi kepailitan, kreditor mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitor yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitor lainnya. Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditor mempunyai seorang penjamin atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung menanggung dalam debitor. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan (*borgtocht*) atau pada perjanjian tanggung-menanggung secara pasif. Kecuali karena adanya perjanjian yang sengaja diadakan, pihak ketiga juga dapat mengikatkan diri secara perorangan pada kreditor untuk pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pada jaminan perorangan kreditor merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditor merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitor.

Apabila debitor dinyatakan pailit yang mana hutang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata yaitu segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali. Kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*" (Jerry Hoff, 2000 : 13).

Berdasar pasal-pasal di atas sangat jelas bahwa apabila debitor tidak mampu membayar piutangnya atau wanprestasi maka kreditor diberikan kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap harta benda debitor, kemudian hasil dari pelelangan



tersebut dibagi secara rata terhadap setiap kreditor yang terkait. Dalam hal ini maka berlaku pula asas *paritas creditorium* dimana pembayaran atau pelunasan utang dilaksanakan secara berimbang dengan demikian dalam kepailitan debitor maka para kreditor pemegang hak jaminan perorangan hanya akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja, yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, karena dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu sebagai objek jaminan.

Adanya jaminan perorangan, kreditor akan merasa lebih aman dari pada tidak ada jaminan sama sekali karena dengan adanya jaminan perorangan kreditor dapat menagih tidak hanya pada debitor tetapi pada pihak ketiga yang menjaminkannya dan kadang terdiri atas beberapa orang. Sehingga apabila perjanjian utang piutang itu dijamin dengan jaminan perorangan, sedang dalam perjanjian jaminan perorangan itu tidak ada benda tertentu milik penanggung yang diikat, disini hanya berupa kesanggupan saja dari pihak penanggung untuk menanggung hutang debitor apabila debitor wanprestasi atau ingkar janji maka akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata.

Dengan demikian apabila debitor dinyatakan pailit sedang harta pailit tidak mencukupi untuk menutup hutang-hutang debitor, maka harta milik penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak-hak agunan lainnya dapat dimasukkan ke dalam harta pailit sebesar apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian penanggungan, hal ini sesuai dengan keadilan dan taat pada asas moral yaitu siapa yang berjanji haruslah menepati janji itu.

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya apabila penanggung adalah penanggung perusahaan. Pengadilan Niaga pernah menerima dan memutus pailit berbagai permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga. Tidak ada penjelasan mengenai hal itu, tapi secara umum ada kecenderungan bahwa kreditor enggan berurusan dengan debitor pribadi untuk alasan praktis.

Pada prosesnya secara umum dalam tenggang waktu 15 hari hakim pengawas beserta Kurator dan para kreditor bersama-sama mengadakan rapat dalam rangka mengevaluasi data baik yang menyangkut harta pailit serta jumlah kreditor beserta besarnya piutang masing-masing. Apabila di dalam rapat tersebut, berdasarkan pencocokan utang piutang ternyata harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang debitor pada kreditor maka harta kekayaan seorang penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak agunan lainnya dapat dimasukkan kedalam harta pailit sebagai sumber pelunasan bagi hutang debitor pada kreditor. Dalam artikel ini penulis memilih putusan dengan Nomor 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

Perkara diawali dengan permohonan pailit yang diajukan kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio. Kav. 25, Jakarta dan memilih kuasa hukum Yuhelson, SH., MH., MKn, Baredy E.W. B. SH, Felix Bonaparte, SH dan Beni Wijanarko, SH, para advokat pada kantor Yuhelson & Partners sebagai pemohon, melawan Liem Iwan Yuwana yang beralamat di Jalan Roda No 23, Rt 002, Rw 006, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor sebagai termohon.

Mengenai duduk perkaranya, yang menjadi dasar dan alasan pemohon pailit mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit adalah kedudukan termohon pailit selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) adalah selaku debitor langsung yang wajib membayar semua utang PT. Metalindo Perwita kepada pemohon pailit. Sejak Januari 2009, PT. Metalindo Perwita selaku debitor mengalami kondisi kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada beberapa kreditor salah satunya adalah PT. Bank OCBC NISP, sehingga karena kondisi ketidakmampuan dari PT. Metalindo Perwita tersebut, kreditor memohon kepada pengadilan untuk memailitkan PT. Metalindo Perwita agar pelunasan piutang yang dimiliki kreditor dapat terpenuhi.

Setelah proses kepailitan dilaksanakan, ternyata harta dari PT. Metalindo Perwita yang termasuk ke dalam harta pailit tidak mencukupi dari jumlah piutang kreditor, sehingga kreditor meminta pertanggung jawaban kepada *personal guarantee* atau *garantor* dalam hal ini Liem

Iwan Yuwana, yang telah mengikatkan diri sebelumnya melalui perjanjian jaminan dengan kreditor untuk melunasi utang dari debitor dalam hal ini PT. Metalindo Perwita apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditor. Setelah beberapa kali garantor dipanggil dan diberikan peringatan, tetapi tidak juga menunjukkan itikad baiknya dalam mempertanggung jawabkan kewajibannya kepada kreditor, maka kreditor memohon kepada pengadilan untuk memailitkan juga *garantor* dari PT. Metalindo Perwita tersebut.

Dari perkara kepailitan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitor utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik, untuk memenuhi kewajibannya maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau *personal guarantee*.

### C. Pertanggung Jawaban Pihak *Personal Guarantee* yang Dinyatakan Pailit Terhadap Utang Debitor

Dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Dalam Pasal 1831 KUHPerdato dijelaskan bahwa seorang penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Namun, pada Pasal 1832 KUHPerdato memberikan pengecualian terhadap Pasal 1831 KUHPerdato, terhadap penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, selain karena telah melepaskan hak istimewa apabila:

1. Apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya aset-aset debitor utama terlebih dahulu disita dan dijual.
2. Apabila penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitor utama secara tanggung menanggung.

3. Debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya menyangkut dirinya sendiri secara pribadi.
4. Jika debitor dalam keadaan pailit.
5. Dalam hal penjaminan atau penanggungan yang telah diberikan berdasarkan perintah pengadilan.

Dapat disimpulkan sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdato angka 2 bahwa kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah sama-sama seorang debitor. Akibatnya penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada kreditor atau para kreditornya apabila debitor utama tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, syarat untuk dapat dipailitkan adalah seorang debitor, maka yang perlu dibahas adalah apakah seorang penjamin adalah debitor, sehingga kepadanya dapat dimohonkan pailit. Masalah apakah seorang penjamin adalah debitor merupakan hal sangat penting apabila ingin memailitkan penjamin, hal ini dikarenakan yang dapat dipailitkan hanyalah debitor, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Maka syarat utama apabila ingin memailitkan penjamin adalah pemohon harus dapat membuktikan bahwa status penjamin telah beralih menjadi debitor, karena hanya debitor yang dapat dipailitkan, setelah itu barulah pemohon harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, setelah terbukti barulah debitor dapat dinyatakan pailit.

Seorang debitor baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan Hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan (*Lex et Societatis*, Vol. III/No. 2/Mar/2015).

Menurut **Pendapat Elijana S** (Hakim Tinggi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) "...yang dapat dipailitkan adalah seorang debitor. *Guarantor* adalah debitor apabila debitor lalai atau cidera janji, jadi seorang *guarantor* dapat saja dipailitkan."

Untuk *guarantor* yang tidak melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditor harus menggugat debitur utama terlebih dahulu, setelah harta debitur utama disita dan dilelang tetapi tidak cukup utangnya untuk melunasi seluruh utangnya jadi masih ada sisa utang yang belum terbayar atau telah terbukti debitur utama telah tidak mempunyai harta apapun lagi atau debitur utama telah dinyatakan pailit oleh kreditor lain, baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitur baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitur utama kepada *guarantor*. Apabila *guarantor* setelah ditagih tidak mau membayar maka dapat diajukan permohonan kepailitan, untuk kreditor pemohon harus dapat membuktikan bahwa:

1. Kreditor pemohon telah menagih/menggugat debitur utama terlebih dahulu tetapi ternyata:
  - a. debitur utama tidak mempunyai harta sama sekali
  - b. harta debitur utama tidak cukup untuk melunasi utangnya.
  - c. debitur utama dalam keadaan pailit.
2. *Guarantor* sebagai debitur mempunyai lebih dari 1 kreditor.
3. Bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Untuk *guarantor* yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, terutama untuk *guarantor* yang telah menyatakan dirinya bertanggung jawab renteng dengan debitur utama terhadap utang debitur utama kepada kreditor maka kreditor dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap *guarantor* tersebut dengan mengajukan sebagai bukti:

1. Surat perjanjian kredit
2. Surat perjanjian penanggungan *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya dan menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitur utama.
3. *Guarantor* termohon pailit mempunyai utang pada kreditor lain.
4. Salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi *guarantor* sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dengan debitur utama terhadap utang tersebut, tetap tidak dibayar.

Jadi: “ ...*Guarantor* baik itu *Personal* atau *Corporate Guarantor* dapat dipailitkan hanya kapan, dalam hal apa juga bagaimana caranya harus diperhatikan dan dipenuhi agar Permohonan Pernyataan Pailit terhadap *Guarantor* dapat dikabulkan ” (Elijana S, 2001 : 402).

Oleh karena itu, penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah seorang debitur maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Dalam perkara permohonan pailit antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk dengan Liem Iwan Yuwana pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dilihat dari akta jaminan atau *borgtocht* antara Bank OCBC NISP, Tbk dengan PT. Metalindo Perwita yang memiliki penjamin atau *personal guarantee*.

Dalam akta jaminan tersebut termohon pailit dalam perkara ini berkedudukan selaku pihak penjamin pribadi atau *personal guarantee* atas utang PT. Metalindo Perwita. Sesuai dengan putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tujuan akta jaminan atau *borgtocht* tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya pembayaran utang PT. Metalindo kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh debitur utama (PT. Metalindo) dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk sebagai pemohon pailit dalam perkara ini.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tersebut pula tampak bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) tersebut maka termohon pailit menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk dan atas permintaan pertama dari pemohon pailit dan tanpa syarat apapun menggantikan kedudukan PT. Metalindo sebagai debitur dan/atau membayar dengan seketika dan sekaligus kepada pemohon pailit untuk semua utang dan/atau kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Metalindo kepada pemohon pailit, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian kredit. Akibat kedudukan termohon pailit tersebut maka termohon pailit dapat dikatakan sebagai debitur pula seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 alinea kedua akta *borgtocht* antara termohon pailit dengan pemohon pailit yang menegaskan bahwa jaminan perorangan dari termohon pailit merupakan 58 kewajiban pokok dan utang termohon pailit sendiri dan akibatnya dalam hal ini pemohon pailit tidak diwajibkan untuk:

- a. Menagih kepada PT. Metalindo;
- b. Mengajukan perkara atau menuntut PT. Metalindo melalui pengadilan;
- c. Mengajukan permohonan penetapan pailit atau likuidasi terhadap PT. Metalindo;
- d. Mengambil pelunasan dari jaminan lainnya yang dipegang oleh pemohon pailit sehubungan

dengan kewajiban PT. Metalindo berdasarkan perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipastikan termohon pailit juga merupakan debitor utama karena termohon pailit bersama-sama dengan debitor utama yaitu PT. Metalindo mengikatkan dirinya secara tanggung renteng. Sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara bahwa termohon pailit dapat dituntut untuk dipailitkan tanpa penyitaan dan penjualan aset-aset PT. Metalindo untuk melunasi utangnya.

Pasal 1820 KUHPerdara yang mengatur tentang penanggungan menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1820 tersebut terlihat bahwa *personal guarantee* atau penjamin hanya dapat diminta pertanggung jawaban apabila si berutang atau debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya, tetapi jika merujuk pada Pasal 1832 KUHPerdara pada angka 2 terdapat pengecualian terhadap penjamin atau penanggung yang dapat langsung diajukan permohonan pernyataan pailit jika penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama si berutang atau debitor secara tanggung renteng.

Dalam perkara ini, perihal pengecualian tersebut dapat terlihat dari akta jaminan atau *borgtocht* antara pemohon pailit dengan termohon pailit yang dalam hal ini pihak penjamin berjanji dan mengikatkan diri tanpa syarat apapun untuk menggantikan PT. Metalindo sebagai debitor utama. Berdasarkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 72/ PAILIT/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST dinyatakan bahwa pada diri termohon pailit melekat secara identik perjanjian pokok. Atas perjanjian utang piutang tersebut dengan sendirinya menurut hukum segala kewajiban yang diajukan terhadap debitor utama terjamin sama hakikatnya terhadap penjamin sebagai garantor.

## D. Penutup

Dapat disimpulkan sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara angka 2 bahwa kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah sama-sama seorang debitor. Akibatnya penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada kreditor atau para kreditornya apabila debitor utama tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih. Oleh karena itu, penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* dapat pula dikatakan sebagai seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

*Personal Guarantee* dalam hal debitor pailit yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang manakala debitor utama sendiri yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini *personal guarantee* dapat diindikasikan dengan perjanjian pokok sehingga proses pertanggung jawabannya yang dilalui akan sama halnya dengan proses kepailitan debitor utama. Hendaknya semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian jaminan dalam *personal guarantee* memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya penjamin (*personal guarantee*) dalam perkara kepailitan, demikian sebaliknya debitor dapat memberikan penjelasan yang lengkap kepada kreditor tentang segala sesuatu yang menyangkut perjanjian jaminan.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Elijana S. 2001. "*Proses Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Guarantor dan Holding Company*". Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Failli atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P. 2010. *Bebas Jeratan Utang-Piutang*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Jerry Hoff. 2000. *Undang Undang Kepailitan Indonesia*. Penerjemah Kartini Mulyadi. Jakarta : PT. Tatanusa



M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni

Sentosa Sembiring. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*. Bandung : CV. Nuansa Aulia

Sutan Remi Sjahdeini. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa

#### Internet:

<http://thepresidentpostindonesia.com/2013/05/13/personal-guarantee-dalam-pengajuan-kredit/>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28655/3/Chapter%20II.pdf>

[http://www.researchgate.net/publication/42353666\\_Peranan\\_Dan\\_Tanggung\\_Jawab\\_Penjamin\\_\(Personal\\_Guarantee\)\\_Di\\_Dalam\\_Permohonan\\_Perkara\\_Pailit](http://www.researchgate.net/publication/42353666_Peranan_Dan_Tanggung_Jawab_Penjamin_(Personal_Guarantee)_Di_Dalam_Permohonan_Perkara_Pailit)

<https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-guarantor-dalam-kepailitan/>

<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58948/Tantra%20Agistya.pdf?sequence=1>

#### Jurnal:

Dilva Muzdaliva Sawotong. 2014. "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan." *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1

Nadia Reinatha . 2014. "Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rahmita Suryani. 2014. "Tanggung Gugat Perseroan Terbatas KBS atau Pemutusan Kontrak Secara Sepihak kepada Perseoran Terbatas ASIP Berdasarkan KUHP." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 3 No. 1

Rudy Mamangkey. 2015. "Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit." *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 2